Wawasan Kebangsaan dalam Pusaran Iman Katolik (Refleksi Nilai Ajaran Katolik terhadap Keutuhan NKRI Studi di Kota Kupang)

Raudlatul Ulum
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI
gelombanglaut@gmail.com
Artikel diterima 20 Mei, diseleksi 7 Juli, dan disetujui 28 Juli 2017

Abstract

Catholics in Indonesia perceive that the Republic of Indonesia is founded by many elements of religious entity. The strength of the state completely lies on the agreement of many adherents of religion to unite as an independent country. The spirit of nationalism is the acknowledgement of all people who are equally important to enhance the dignity of Indonesia. The research on Catholics in Kupang is aimed at understanding the relationship of Catholic theology and nationalism in socio-political practices and current realities of the adherents, especially the religious elites, public figures, Catholics in general, and youth. Based on the result of the research, it is highly recommended that the formulation of national identity and guarantee of the religious freedom is important. It is equally important to strengthen the nationalism by enhancing the understanding of Catholic theology.

Keywords: *Catholic, Nationality, Nationalism.*

Abstrak

Penganut Katolik di Indonesia meyakini bahwa Republik Indonesia didirikan oleh berbagai entitas agama. Kekuatan republik justru karena adanya kesepakatan berbagai macam penganut agama untuk bersatu menjadi satu bangsa yang berdaulat. Roh kebangsaan adalah pengakuan satu sama lain sebagai anak bangsa yang sama pentingnya untuk meninggikan martabat Indonesia. Penelitian tentang Katolik di Kupang ditujukan untuk memahami hubungan ajaran Katolik dengan kebangsaan dalam praktek sosial politik dan tindakan kekinian oleh pemeluknya, terutama rohaniawan, tokoh awam, umat basis dan pemuda. Penelitian menyimpulkan tentang adanya keterkaitan yang kuat antara ajaran Katolik dengan kedaulatan, kebhinnekaan, pancasila, nasionalisme dan kebangsaan secara utuh. Berdasarkan hasil direkomendasikan tentang pentingnya perumusan sebuah identitas nasional, berlangsungnya jaminan dan kebebasan beragama. Tentunya penting untuk usaha penguatan kebangsaan untuk mengatasi pendangkalan ideologi.

Kata kunci: Katolik, Kebangsaan, Nasionalisme.

Pendahuluan

Bagi manusia Indonesia, agama adalah unsur terpenting dibandingkan berbagai pelik persoalan kehidupan kebangsaan lainnya, konsepsi tersebut berlaku sampai sejak negara ini berdiri sampai dengan saat ini. PEW Research pada tahun 2015 memertegas posisi keagamaan tersebut, bertema Global Attitudes Survey, hasilnya menempatkan Indonesia pada posisi ketiga setelah Ethiopia dan Senegal sebagai masyarakat yang menjadikan agama hal terpenting dalam hidupnya (www.pewglobal.org, diunduh Oktober 2016). Sebagian besar

orang Indonesia membutuhkan agama sebagai bagian dari spritualitas dan laku batiniah, meskipun tak dapat ditampik aspek sosiologis sebagai pranata kehidupan yang menentukan relasi sosial seperti apa yang dilakoni. Aspek lain yang kerap muncul ke ruang publik, agama menjadi ideologi yang cukup menentukan pada warna kekuasaan dan pernak pernik politik. Karena itulah, topik mengenai agama selalu mendapat perhatian.

Perkembangan sistim dunia yang semakin cepat, menciptakan manusia dinamis yang mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi turut serta melahirkan cara pandang baru menghadapi kehidupan.Tak terkecuali hubungan manusia, agama dan negara. Dari berbagai penganut agama yang ada, Katolik adalah satu entitas yang cukup penting menunjang berdiri dan bertahannya republik ini. Peran ajaran Katolik signifikan dalam hal membangun mentalitas kebangsaan, setidaknya bagi anak bangsa yang menjadipemeluknya. Menelusuri sejarah Katolik di nusantara tidak bisa dilepaskan dari eksistensi pemeluk agama tersebut di Maluku dan Nusa Tenggara Timur, agama yang berpusat di Roma ini memiliki pemeluk yang dominan di dua daerah tersebut. Meskipun catatan sejarah yang dipahami umum, kedatangan agama tersebut diawali sejak Portugis masuk nusantara, namun catata lain disebutkan Kristen tiba diIndonesia itu sendiri disebutkan sejak era kerajaan. Sebuah catatan tentang adanya sebuah komunitas Kristen di Baros Sumatera Utara pada zaman Tribuana Tungga Dewi menjadi Ratu Majapahit (1329-1250), sayangnya alur sejarah perkembangan Kristen sepertinya belum dapat ditelusuri melalui catatan tersebut (Aritonang dan Streenbrink, 2008: hal 3-6).

Katolik masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur, bermula dari perjanjian Tordesilas 7 Juni 1494 (antara Portugis dan Spanyol), disebutkan Paus Alexander VI menyerahkan kepada bangsa Portugis belahan bumi bagian Timur. Perjanjian tersebut juga membagi daerah kekuasaan mereka menjadi dua bagian dengan satu garis demarkasi yang berawal dari garis meridian 370 sebelah Barat Kepulauan Cape Varde. Kemudian diperkuat dengan Perjanjian Zaragoza (22 April 1529) yang membentangkan garis demarkasi hingga ke Samudera Pasifik, sehingga Portugis memperoleh Filipina namun kemudian ditukar oleh Spanyol dengan daerah Amerika Latin, yakni Brazil yang berada di sebelah barat demarkasi Tordesillas (Irawan, 2014 hal. 46).

Sekitar tahun 1613 raja Kupang, Ampono dibaptis menjadi Katolik, mengikuti jejak Ratu Mena, kerajaan Mena dipimpin oleh janda di pulau timor, dan merupakan salah satu pusat perdagangan kayu cendana(Hagerdal, 2012 hal. 30). Pada tahun 1900 pemerintah Belanda menegaskan lagi mengenai pembagian wilayah kerja misi dan zending. Penegasan tersebut berisi: pulau Flores dan daerah kepulauannya diserahkan kepada misi katolik. Zending mendapat dua daerah di Pulau Timor Belanda yakni Kupang, Timor Tengah Selatan, di samping Pulau Sabu, Rote, Alor Pantar dan Pulau Sumba. Pada tahun 1913, pulau Timor menjadi Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil (1913-1920) (Naisaban, 2013 hal. 167-174) . Berbagai kesulitan yang timbul sebagai akibat dari perang dunia pertama di Eropa, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memberikan beberapa kemudahan kepada gereja Katolik.

Sepanjang perjalanan waktu, sebagai prefektur Apostolit Timor, Kupang menjadi pusat misi katolik bagi daerah-daerah sekitarnya.Gedung gereja dikembangkan pada tahun 1936 dan dipergunakan untuk berbagai kegiatan.

Di tengah suasana kalut menjelang perang dunia kedua, Residen di Kupang mengeluarkan lagi izin resmi terhadap pembukaan stasi-stasi misi katolik di Kupang, Timor tengah Selatan, Alor-Pantar, Sabu dan Rote. Dalam situasi yang samapada tahun 1939 sejumlah besar orang Timor Tengah Selatan menerima baptisan sebagai Katolik. Sampai saat ini Kota Kupang masih menjadi daerah vital bagi pengembangan Katolik di daerah Nusa Tenggara Timur meskipun dari jumlah pemeluknya bukanlah mayoritas, Keuskupan Agung Kupang memiliki peran penting bagi daerah sekitar Pulau Timur sampai dengan Rote (**Memoir Uskup Keuskupan Agung Kupang, 1997)**.

Penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana pemikiran rohaniwan dan tokoh Katolik tentang kebangsaan. Studi dilakukan dengan menggali sejarah, tindakan dan ekpresi kekinian dari para penganut Katolik, baik itu tokoh, rohaniwan sampai dengan golongan muda terhadap kebangsaan Indonesia. Fokus studi adalah dalil dan makna ajaran agama terhadap nasionalisme, pancasila, bentuk negara NKRI, kebhinnekaan dan demokrasi.

Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terbatas, ditunjang dengan data sekunder melalui dokumentasi tentang peran tokoh dan rohaniwan Katolik serta gambaran kehidupan keagamaan di Kota Kupang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi agama dan politik kebangsaan. Subjek penelitian terdiri atas tokoh awan, rohaniwan/pastor/romo di beberapa paroki dibawah keuskupan agung Kupang.Penelitian lapangan dilakukan di Kota Kupang, selama 12 hari, tanggal 9 s.d. 20 Juni 2015.

Kerangka Pemikiran

Pendekatan studi dilakukan dengan kerangka pemikiran berlandaskan teori *imagined community* Benedict Anderson serta teori kebangsaan dan nasionalismenya Ernest Renan (1882). Ernest Renan menyatakan bahwa kebangsaan merupakan jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari kemuliaan bersama di masa lampau (aspek historis), dan keinginan untuk hidup bersama di masa yang akan datang (Renan, 1882 hal. 31). Dengan begitu, nasionalisme dipahami sebagai keinginan bersama antarwarga negara tanpa paksaan dengan semangat persamaan. Benedict Anderson (2006, hal 6) mendefinisikan bangsa sebagai "suatu komunitas politis yang dibayangkan dan sekaligus sebagai sesuatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat" (an imagined political community and imagined as both inherently limited and sovereign). Bangsa merupakan sebuah komunitas terbayang karena mustahil bagi individu anggotanya untuk benar-benar pernah berinteraksi. Terbatas dalam arti hanya orang-orang tertentu yang memiliki syarat inheren adalah bagian dari bangsa. Berdaulat berarti bangsa-bangsa ini menganggap dirinya memiliki wilayahnya yang mandiri.Memahami ruang dan ideologi, tidak dapat dilepaskan juga dari cara padangan Political Geoghraphy (Geopolitik). Setidaknya Frederich Ratzel mengemukakan bahwa negara hanya dapat kokoh, berkembang, dan menjadi besar apabila bangsa tersebut kuat dalam ikatan. Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai orang yang mencetuskan ilmu bumi politik (Political Geogrephy). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjaan ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964)dari Jerman menjadi Geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik

dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan *teia* yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006 hal. 195). Dalam hal ini penting untuk memahami pemeluk suatu agama menjadi bagian dari bangsa melibatksan diri dan lebur, menerima semua konsep negara-bangsa yang secara bersama sama dibangun dan dipelihara.

Hasil dan Pembahasan

Keuskupan Agung Kupang terletak di Kota Kupang yang menjadi ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.Kota tersebut adalah yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor.Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km^2, Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2014 berjumlah 450.360 (BPS Kota Kupang, 2015). Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Kupang, jumlah pemeluk agama Katolik di Kota Kupang pada tahun 2013 tidak lebih dari 21 persen (sumber: kantor Kemenag Kota Kupang 2014), namun Keuskupan Agung Kupang sendiri menembus batas administrasi sampai Pulau Alor dan Pulau Pantar.

Katolik dan Komitmen Kebangsaan

Katolik dalam konteks kebangsaan Indonesia, menjadi warna dan nafas perjuangan bagi pemeluknya, terdapat dua sisi paralel antara spirit kebangsaan dan keagamaan, setidaknya suasana kejiwaan itu diungkapkan dalam berbagai catatan sejarah.Keterlibatan penganut Katolik dalam kemerdekaan Indonesia telah hadir sejak awal, meskipun lebih dahulu Kristen, namun perannya cukup berarti, terutama sejak Monsinyur Sugijapranata berperan aktif memerjuangkan kemerdekaan. Begitu juga dengan para pemuda Katolik dari Nusa Tenggara Timur, sebagai anak bangsa para pemuda Katolik ikut terlibat dalam semua proses pembentukan negara. Pada masa perjuangan kemerdekaan para pemuda Nusa Tenggara Timur beragama Katolik membela Indonesia sampai ke Kalimantan Utara saat itu bergabung dengan relawan ganyang Malaysia. Memahami kenusantaraan sebagai satu wawasan kebangsaan adalah hal lumrah dimengerti sejak awal kemerdekaan. Pengorbanan fisik pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur terlibat tidaklah main main, apalagi tidak dibekali peralatan dan logistik yang memadai. "tidak ada jaminan apa-apa, kita berangkat saja bersama pemuda dari seluruh Indonesia". (wawancara dengan Daniel Salem, 11/5/2015)

Nasionalisme penganut Katolik kerap dihadapkan pada pertanyaan tentang kedaulatan keuskupan, garis lurus antara lembaga kegamaan terbawah sampai dengan kepausan di Vatikan. Dalam hal ini, keuskupan sebagai daulat keagamaan Katolik memiliki sifat yang berbeda dengan negara¸ meskipun keuskupan itu melewati batas-batas administrasi kekuasaan, sejatinya otoritas dan kewenangan pemerintahan sepenuhnya diakui oleh gereja (wawancara dengan Anton Belle, 10/5/2015). Katolik memiliki struktur organisasi tersendiri yang berpusat di Vatikan dengan Paus sebagai pimpinan spiritual tertinggi,garis keorganisasiantegak lurus antara Vatikan sampai dengan gereja di suatu kota sampai dengan kelompok umat terkecil (Komunitas Umat Basis). Secara prinsip, Katolik memisahkan urusan gereja dengan negara dalam artian praktis, tetapi secara moral gereja memiliki kontrol

jika negara keluar dari jalur demokrasi dan kesejahteraan umum. Pondasi dasar hubungan gereja dengan negara adalah Matius 22:21."Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah" (Matius 22:21)

Sepak terjang penganut Katolik bersama dengan anak bangsa beragama lain memberi warna terhadap persatuan bangsa, doktrin keindonesiaan cukup memberi pengaruh terhadap mereka, sehingga keterlibatannya diakui dan dianggap penting bagi republik. Unsur penyatuan dan integrasi pada Indonesia sebagai satu bangsa meyakinkan bahwa sudut pandang keragamaan budaya, agama, sukuadalah tonggak utama. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah empat pilar itu lahir dari faktor keberagaman.Jikapun ada paham yang mengatakan antara teologi agama dan negara yang dipisah, kenyataannya dalam kehidupan tidak perlu dipisah-pisah.Subjeknyasama, yaitu masyarakat, umat beragama. Landasan pikir yang digunakan sebagai dalil terhadap pengakuan terhadap kekuasaan negara adalah gereja dapat memahami kalau jalan yang dapat memberikan kesejahteraan umum(wawancara dengan Romo Gerardus Duka, 12/5/2015). Aspek dualitas sebagai anak bangsa dan penganut Katolik seringkali menjadi objek yang perlu dijelaskan oleh sarjana Katolik, tidak kurang Karl Keating (lahir 1950) seorang Apologeter Katolik, kemudian St. Josemaria Esriva (1902-1975), Jhon Jay Huges, Beato Yohanes Paulus (w. 2005), sampai Sugijapranata (1896-1963) menegaskan bahwa kecintaan kepada tanah air mutlak bagi penganut Katolik sebagai bagian adalah kebajikan. Ketaatan kepada otoritas keagamaan, tidak menghalangi umat Katolik untuk mengakui otoritas di bawah Negara--bahkan gerejapun begitu--tunduk pada hukum yang berlaku pada negara (wawancara dengan Daniel Salem 10/5/2015, dan Anton Belle 11/5/2015). Selama ini Keterlibatan gereja pada urusan negara dan masyarakat melalui tokoh awam.

Tokoh awam adalah perpanjangan tangan gereja dalam urusan politik dan kenegaraan.Berbeda dengan pastor sebagai manusia yang tertahbis yang tidak boleh turut aktif dalam politik praktis (wawancara dengan Daniel Salem, 10/5/2015).Konsepsi ini dipahami secara umum dan lazim dalam tradisi gereja Katolik. Meskipun peran penting Romo Sugijapranata yang terlibat aktif dalam hal membangun nasionalisme di kalangan Katolik, namun pembagian tugas diantara pastur dan tokoh awam cukup signifikan dari masa ke masa terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tokoh awam adalah mereka seseorang yang memiliki tanggungjawab terhadap kegiatan gereja, mengurus segala urusan keagamaan nonekaristi (Adolf Heuken SJ. Ensiklopedi Gereja. Jilid V, 2005 hal 233-235). Struktur awam tidak mengurusi hal ihwal liturgi namun dapat memimpin rumah ibadah, dengan kata lain dapat melakukan kegiatan keagamaan setingkat Kapela, Stasisampai dengan Kelompok Umat Basis, termasuk didalamnya OMK (Orang Muda Katolik), serta Kelompok Kerasulan Anak (wawancara dengan Anton Belle, 11/5/2016,mengacu pada Kitab Hukum Kanonik 1983 dibawah judul *De Potestate Regiminis* (kuasa kepemimpinan) menjelaskan secara rinci tentang kepemimpinan Gereja).

Posisi keberadaan negara sendiri ditentukan oleh kebijakan pemerintah didalamnya, dalam pandangan tokoh awam dan rohaniwan Katolik posisi rakyat adalah pendukung dan menjadi bagian negara jika tercipta keadilan.Jadi persoalan hubungan negara dengan agama tidaklah terletak pada doktrin patriotisme dengan lembaga keagamaan namun kepada isu

keadilan. Hadirnya agama hakikatnya untuk harkat, mengangkat martabat manusia (wawancara dengan Romo Okto, 13/5/2015), sehingga dalam satu sudut pandang tertentu kemiskinan dan ketertinggalan di Indonesia bagian timur dapat memicu dispatitas keindonesiaan. Aspek kerentanan lingkup bangsa sebagai komunitas terbayang sepertinya menghadapi tantangan serius, persatuan dan kesetiaan menjadi sebuah bangsa tentunya akan diuji oleh kesenjangan. Masihkah orang akan tetap bersatu ditengah jurang kepemilikan yang tidak seimbang.

Aspek fundamental mengenai negaradi kalangan Kristenmengacu pada *Perjanjian Baru*, Roma 13:4."Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlahakan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang.Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat" (Roma 13:4). Jadi doktrin *sovereignity* keindonesiaan dapat dibangun melalui dalil keagamaan dengan alasan pemerintah adalah hamba Tuhan untuk menciptakan keadilan.

Bagi umat Katolik doktrin cinta tanah air ada terrmasuk di dalam hukum kanonik yang merupakan bagian dari ajaran.Doktrin di dalam ajaran Katolik tidak diperkenankan mendirikan negara-agamasehingga tidak bisa memisahkan dari NKRI(wawancara dengan Daniel Salem, 10/5/2015). Mengacu pada sepuluh perintah Tuhan, pada poin keempat disebutkan hormatilah orang tuamu. Lazim diartikan bahwa orang tua itu termasuk pemerintah, pemimpin negara.

Gereja cukup optimal dalam hal menanamkan bahwa tidak adapertentangan antara agama dengan nasionalisme.Secara konseptual apologi Katolik yang disampaikan oleh Karl Keating sampai dengan Mr Sugijapranata (w.1963) lebih memilih diksi patriotisme dibandingkan dengan nasionalisme yang menganggap patriotisme adalah jenis cinta yang baik(Subanar 2005, hal 82). Pada masa perjuangan republik, adalah ujian bagi penganut Katolik di Nusa Tenggara Timur saat Indonesia memerangi Timor Timur, pemuda memilih berada di pihak Indonesia meskipun memiliki kesamaan agama (Wawancara dengan Anton Belle, 11/5/2015). Doktrin kebangsaan sendiri di kalangan dikembangakan sejak periode kemerdekaan, yaitu muncullah jargon 100% Katholik, 100% Indonesia. Jargon tersebut cukup memberi ketegasan tentang posisi umat katolik terhadap keindonesiaan. Dalil kebenaran untuk meneguhkan kebangsaan tidak hanya berdasarkan sepuluh perintah tuhan namun juga dari sumber lain. Sumber ajaran tidak hanya kitab suci, ada ajaran magisterium Gereja seperti keputusan konsili dan ensiklik, jadi pedoman yang digunakan umat Katolik dalam menjalankan kehidupan agama dan lainnya, yaitu: 1) Kitab Suci, 2) Tradisi gereja, 3) Keputusan Paus (wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015).

Untuk konteks Indonesia perkembangan nasionalisme dimulai dari tahapan-tahapan etno-nasionaliseme, kemudian religio-nasionalisme serta nasionalisme kebangsaan (wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015).Etno nasionalisme adalah tahapan paling dini meskipun keorganisasiannya muncul setelah Budi Utama yang bercorak *scholar* dan profesi. Poin penting kebangkitan etnonasionalisme ditandai dengan munculnya organisasi pemuda yang bernuansa etnik dan daerah, misalnya Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatran Bond. Tahapan berikutnya adalah religionasionalisme bernuansa agama ditandai dengan berdirinya Jong Islamieten Bond. Puncak dari proses nasionalisme tersebut adalah sumpah pemuda yang dianggap sebagai kontrak politik menuju satu bangsa satu nusa dan satu bahasa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam catatan Jegalus, mengutip disertasi tentang filsafat sosial pancasila, berdiri tanggal 15 Agustus 1950, setelah dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat. Federasi saat itu disatukan ke dalam NKRI, ada proklamasi kembali menyangkut keseluruhan wilayah, tanpa Papua dan Timor-Timur. Jadi ada beberapa fakta yang tidak banyak diketahui oleh rakyat Indonesia tentang kelahiran NKRI, karena proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk Republik Indonesia saja. Menyangkut kewilayahan, masuknya Irian Jaya tahun 1963-1973 menjadi Provinsi, kemudian bergabung Timor-Timur melalui referendum tahun 1978 (wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015).

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila merupakan hal penting didiskusikan karena aspek ideologi yang diusung didalamnya. Keberadaannyaselalu menarik untuk dibicarakan, mengingat karakteristik bangsa dipengaruhi oleh jalan hidup yang dipilihnya *(the way of life)*.Dalam arti sempit ideologi adalah pedoman hidup baik dalam berpikir ataupun bertindak dalam bidang tertentu (Sunarso, Hs, 1986).Posisi dialog agama dan negara menjadikan Pancasila juga tidak terlepas daripada diskursus sejarah bangsa Indonesia, termasuk aspek nilai agama Katolik menjadi bagian pembentuk ideologi pancasila itu sendiri.

Ideologi Negara merupakan konsensus (mayoritas) warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin di wujudkan melalui kehidupan negara itu (Heuken, 1998, hal 93). Bagi umat Katolik, setidaknya bagi tokoh awam Pancasilaadalah alat pemersatu bangsa. Umat Katolik sudah menganut Pancasila sebagai pemersatu. Dengan kenyataan tersebut, jikalau ada yang berani merombak pancasila maka Negara ini akan ambruk (wawancara dengan Daniel Salem, 10/5/2015).

Konsepsi Pancasila yang dapat dipahami melalui ilmu politik (Kekatolikan) ada istilah *Invocatio Dei*, mengundang Allah dalam kehidupan bernegara (wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2016). Makna dari kata tersebut adalah agama merupakan bagian esensial dari negara, persoalan paling fundamental bagi negara adalah menjamin orang beragama. Kontekstualisasi ajaran Katolik terhadap Pancasila dapat dipahami ke dalam seluruh sila yang ada.

Pancasila lahir dari nilai luhur bangsa Indonesia, saya meyakini Pancasila merupakan filosofi dari bangsa nusantara itu sendiri.Romo Okto, Norbert Jegalus, Anton Belle dan Kleden menjelaskan pemahaman Pancasila menurut umat Katolik sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia adalah citra Allah, abdi Allah. Di dalam ajaran kita ini kan Trinitas, tiga wujud, Allah, Putra dan Ruhul Kudus. Hal ini juga sebagai wujud dari Perjanjian Baru, Markus 12:29 "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa". Kemudian Perjanjian Lama, Ulangan 6:4 "Dengarlah hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa". Ulangan 4:35 "Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwaTuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia". Yesaya 44:6 "Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku". Ada juga Yesaya 40:12-28, Keluaran 20:2-5, 1 Samuel 2:2, II Tawarik 2:5.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan ajaran kasih, "mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri, berarti sama dengan

mencintai Tuhan". Dengan kata lain sila kedua dari Pancasila merupakan wujud ajaran cinta kasih. Dalil yang menjadi dasar adalah Matius 22:39 "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri".

3. Persatuan Indonesia. Dalam doktrin katolik mengenal Unitarian, kesatuan itu mutlak, otonomi negara dihargai oleh gereja meskipun dalam beberapa hal berbeda, misalnya hukuman mati. Gereja menerima penegakan hukum meskipun konsisten menentang hukuman mati.

4. Tentang sila keempat. Gereja mendukung pemilihan langsung dalam rangka membangun demokrasi yang baik. Tentang sila ini, pastor itu pada dasarnya dipilih oleh umat di gereja, ada dewan pastor yang bermusyarawarah untuk menetapkan tetapi umat yang tunjuk. sampai tingkat paling tinggi, paus dipilih oleh cardinal melalui *one man one vote*. begitu juga dengan ketua KWI, voting terbuka.

5. Tentang keadilan sosial. Matra terpenting dari gereja adalah terwujudnya keadilan, bagi rakyat. Sila kelima adalah poin paling krusial, kesejahteraan umum adalah tanggungjawab utama dari keberadaan negara, jika tugas ini gagal dilaksanakan maka akan menimbulkan ancaman yang serius

Sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia, sejatinya Pancasila dapat mengakomodasi segala hal yang berkaitan dengan keyakinan setiap warga negara, 'mungkin termasuk ateis',mereka memang tidak memercayai Tuhan, tetapi mereka punya hak hidup, bagaimana memerlakukannya (wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015). Begitu juga dengan aliran kepercayaan yang cenderung bersifat lokalitas, sangat berkaitan dengan entitas kepercayaan lokal, masyarakat Flores amat lekat (agama) Marapu, khususnya yang berasal dari Lawaholot, terikat dalam budaya yang sama, mereka suku Flores, Lambata, Adunara, Solor dan Alor.Tradisi menghormati leluhur tetap berjalan berdampingan dengan agama dunia, perlakuan kepada leluhur selama ini tetap disediakan sesaji dalam upacara, meskipun secara formal beragama Katolik (wawancara dengan Gayus Makhin, 15/5/2015). Perspektif *wertern*, sarjana barat yang mengemukakan syarat syarat agama cukup meminggirkan agama lokal (Syamsul Maarif. Makalah "Definisi Agama dan Kebebasan Beragama" Seminar 14/02/2017).

Keberadaan agama lokal merupakan tantangan tersendiri untuk merumuskan suatu kebijakan keagamaan terutama menyangkut pelayanan keagamaan. Disamping ada entitas ateis yang menggejala di era kosmopolitanisme.Di era Posmomodernisme, kalau mengaca pada masyarakat Eropa, manusia tidak lagi memerlukan ideologi bahkan agama, mereka lebih butuh hukum yang memberikan jaminan hak-hak warga negara.Sistem hukum nasional belum terbuka, sehingga tidak ada jaminan sipil terhadap ateisme dan agama-agama local(wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015).

Sebagai pandangan hidup dan pemersatu, Pancasila bukan lagi diskursus, ini adalah pengalaman religius bangsa.Sejalan dengan darimana rumusan formal dan yuridisnya berasal dari rumusan hakiki pengalaman religius nenek moyang bangsa Indonesia. Mungkin dulu tidak disebut Allah atau yang lain, hal inilah yang melahirkan Ketuhanan yang Maha Esa. Urutan kedua adalah kemanusiaan karena penghayatan terhadap keimanannya.Ketiga, jika sudah hormat pada Tuhan dan manusia pasti ada persaatuan.Keempat, membicarkan

semua bersama, kepentingan yang menyangkut umum.Bukan tentang kepentingan personal tetapi kepentingan bersama.Demokrasi sejati masih ada di kampong(wawancara dengan Romo Okto, tanggal berapa, 15/6/2015).

> "Ketika bicara tentang ideologi menjadi pola pikir seluruh bangsa harus tetap ditanamkan dalam hati."(wawancara dengan Anton Belle, 11/5/2016), berbeda konteksnya dengan diskursus politik yang bisa memunculkan banyak kepentingan. Dapat dipahami kepentingan dari berbagai penjuru itupun seringkali ideologis, pancasila bisa dirasuki marxisme atau liberalisme yang sejatinya tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Posisi vital dari Pancasila sebagai produk bangsa lahir dari rahim bangsa,meskipun ideologi bermakna politis setidaknya untuk menyatukan bangsa dan memberikan arah negara dan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, namun Pancasila memiliki jiwa bangsa secara menyeluruh. Kekuasaan diberikan, memiliki dua sisi, secara vertikal diberi dari atas, sebagai amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.Maknanya, kuasa itu bukan untuk menguasai, tapi untuk mengabdi. Sisi lain, kekuasaan itu merupakan mandat oleh rakyat, tentunya dapat diteliti, diawasi oleh rakyat serta wajib mengikutsertakan rakyat dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, maka kekuasaan untuk mengabdi dan melayani (wawancara dengan Jacobus B. Kleden, 14/5/2015). Jika kekuasaan itu bersifat pragmatis, dianggap sebagai kesempatan dan menjadi alat kepentingan diri sendiri atau golongan. Jika kekuasaan itu kepemilikan maka akan lepas, jika kekuasaan itu adalah kepercayaan maka akan menyejahteraan.

Berikutnya tentang ateisme dengan pancasila, dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari konsepsi kebebasan beragama. Tidak beragama dalam perspektif HAM atau tanpa beragamapun sejahtera, bebaskah memilih?, dan bebas tidak beragama. Dalam perspektif humanism praksis, memang tidak memersoalkan bagi beragama, mereka lebih menekankan pada aspek manusia menjadi lebih baik atau tidak.Pada era ini banyak orang beragama belajar ateisme, sedangkan orang ateis belajar percaya. Dalam Katolik, jika ada orang lapar, beri makanan, jika ada orang sakit, kunjungi. Jika ada ateis tanpa baca kitab suci juga melakukan perintah agama, bagaimana posisinya di hadapan Negara?.Secara formal yuridis, ateisme ini tidak ada. Ateis yang suka menolong dimana-mana, mereka melakukan banyak hal kemanusiaan. Tetapi di Indonesia, jika diskusi yang sampai ada ateis, maka kita yang beragama harus menampilkan begitu rupa sehingga agama itu masih dapat dipercaya.(wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015).

Katolik dan Demokrasi

Demokrasi langsung sudah berkembang di polis-polis Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Benih demokrasi Yunani ini mulai terbenam setelah imperium Romawi menguasai Eropa dan Laut Tengah, dilanjutkan masa-masa kerajaan kekristenan yang bernuansa teokrasi. Demokrasi modern dikembangkan lagi di Eropa sekitar abad ke-17 dengan pemunculan filsuf politik seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Lokce (1632-17040, Jean Jaques Rousseau (1712-1778), Baron Montesquieu (1689-1755), dan lain-lain.. Teori-teori demokrasi modern terus disempurnakan lewat percobaan berbagai sistem pemerintahan demokrasi, yang sampai saat ini belum

ada satu pola pasti tentang sistem pemerintahan yang paling demokratis. Akhirnya pilihan sistem pemerintahan demokrasi sangat kontekstual, tergantung dari selera masing-masing bangsa. (Sutardjo Adisusilo, 2009 hal 1-5)

Era 1800-1900, gereja menolak demokrasi, karena tidak masuk akal. Namun, sejak terjadinya revolusi Perancis yang banyak memakan korban imam gereja, sehingga demokrasi dianggap sesuatu yang jelek. Kemudian pada tahun 1962 gereja sudah mulai terbuka, ada *Pacem In Terris*(damai di dunia), melalui ensikili tersebut Paus membuka gereja bagi demokrasi dan HAM, terutama diputuskan pada Konsili Vatikan II (1962-1965) *Gaudium Et Spes*(wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015).

Pada tahun 1991 Paus Paulus Johannes mengeluarkan ensikli *Centesimus Annus*, seratus tahun, secara tegas demokrasi diakui sebagai temuan masyarakat modern yang patut ditegakkan, karena hanya dengan demokrasi *banum commune* (kesejahteraan masyarakat) dapat tercapai. Konsekuensi dari dua ensikli tersebut adalah Gereja Katolik harus hidup searah dengan kehidupan masyarakat (Norbert Jegalus, 16/5/2015).Dalam pandangan tokoh Katolik, saat ini demokrasi yang berlangsung mendekati keadaan pada tahun 1955, cenderung liberal. Berdasarkan dua jenis sistim demokrasi, antara liberal dan republikan,Indonesia menjalankan demokrasi republikan, dan waktumembuktikan liberalism tidak pernah sukses (wawancara Norbert Jegalus, 16/5/2015). Permusyaratan itu adalah puncak dari demokrasi,dengan demikian maka sistim parlementer itu yang cocok. Semua orang memiliki bobot komunal dengan duduk bersama secara beradab membahas dan mengambil keputusan politik.

Musyarawarah itu juga disebutkan Jurgen Habermassebagai puncak demokrasi. Mengacu pada istilah diskursus praktis, dengan kata lain disebut sebagai suatu prosedur (cara) masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersubjektif. Dalam tipe diskursus ini anggota masyarakat mempersoalkan klaim ketepatan dari norma-norma yang mengatur tindakan mereka (Hardiman2009, hlm. 128).Istilah musyarawarah itu dalam pandangan Habermas adalah deliberatif. Dalam konsep deliberatif adalahsesuatu yang akan dilakukan oleh negara (kebijakan), secara teknis permusayaratan dimulai daritingkatan terbawah, misalnya Rukun Tetangga sampai dengan parlemen pusat. Deliberasi meminimalkan pengaruh intervensi oleh negara, rakyat yang tentukan sendiri. Dengan cara ini kelompok minoritas/rentan terjamin hak-haknya tidak mudah dikalahkan oleh suara akumulasi mayoritas.

Merujuk pada model legislasi dan keterwakilan di Indonesia, utusan golongan pada MPR sebelum reformasi, kemudian berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan tersebut tentunya memersempit utusan golongan yang di berbagai negara diisi oleh kelompok rentan, suku terasing dan kelas sosial yang rapuh. Begitu juga dengan sistim produk UU yang *lex specialis*. Misalnya Undang-Undang Haji. Negara memang punya kewajiban untuk melayani sepanjang tidak mengatur isi, jika itu khusus dengan satu agama bagaimana dengan agama lain.Kelompok Katolik sempat keberatan dan menentang adanya peradilan agama, ternyata negara harus menjamin pelaksanaan ibadah agama, sehingga resistensi terhadap peradilan tersebut bisa diterima di kemudian hari.Teori deliberatif berusaha membebaskan kelompok kecil dari tekanan/kemenangan kelompok besar, voting itu sangat berbahaya, apalagi bisa dibayar (wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015).

Konstitusi dan Produk Hukum

Ketaatan kepada konstitusi dan produk hukum, penganut Katolik mendasarkan sikap sebagai warga negara atas perintah yang termuat dalam Perjanjian Baru, Roma 13:1 "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintahan yang ada, ditetapkan oleh Allah". Selanjutnya, dalil pada Roma 13: 1-7 cukup fundamental menyangkut hubungan negara, pemerintahan dengan rakyatnya dalam hal ini umat Kristen didalamnya.

Secara faktual umat Katolik menerima konstitusi, begitu juga dengan sistim hukum didalamnya, meskipun dalam hal penegakan memiliki banyak catatan. Ada banyak dalil yang mendukung posisi vital penerimaan pemerintahan dari aspek kitab suci, diantaranya adalah: Titus 3:1, 1 Petrus 2:13-17, dapat ditafsirkan sebagai pernyataan ketaatan pada sistim pemerintahan termasuk konstitusi yang telah disepakati sampai dengan produk hukum yang mengatur hidup warganya.

Umat Katolik tidak memiliki hambatan untuk tunduk pada perundangan di Indonesia, hanya beberapa catatan menyangkut produk hukum yang masih di bawah bayang-bayang pengaruh kolonial. Begitu juga yang berkaitan dengan penegakan hukum yang belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan.Banyak penyimpangan sehingga seringkali mengecewakan pencari keadilan.Dalam Katolik hukum dilaksanakan oleh pemerintah, gereja tidak mencampuri. Mangaca pada pelajaran tentang kedatangan Kristus yang merevisi dulu Taurat, dirombak untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Satu contoh berkaitan dengan hokummata dibayar mata, berarti balasan setimpal atas kejahatan, Kristus merevisi hal tersebut.Hukuman rajam untuk penzina juga direvisi (wawancara dengan Daniel Salem, 10/5/2015), sehingga secara tegas penolakan terhadap hukuman mati kerap disampaikan oleh gereja.

Di dalam ajaran Katolik tidak ada seperangkat hokum (agama/syariat), dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk memasukkan hukum Katolik ke dalam hukum nasional. Katolik sendiri hanya mengenal hukum perkawinan. Pasangan yang sudah disahkan disatukan oleh Tuhan dan mendapat sakramen, tak bisa dipisahkan kecuali kematian. Berdasarkan doktrin inilah maka tidak dikenal, tidak diperbolehkan adanya perceraian.Berbeda dengan nilai ajaran Yesus yang telah merevisi berbagai ketentuan, tentunya dari sekian ada beberapa hukum-hukum yang bisa diwujudkan dalam hukum positif. Hal tersebut tergantung pada adopsi nilai di ruang legislator (parlemen), mengingat hal penting dari ajaran katolik yang bisa dimasukkan dalam undang undang dan produk hukum lainnya. (wawancara dengan Daniel Salem, 10/5/2015).

Jadi penerimaan terhadap konstitusi berdasarkan dalil reseptasi negara secara utuh, hal tesebut adalahsikap gereja.Pada intinya gereja jelas tidak memersoalkan UUD 1945 (beserta amandemennya), produk hukum dasar tersebut adalah suatu realitas tentang aturan resmi untuk menjamin kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, semua yang telah disepakati oleh negara, pemeluk Katolik akan terima dan tunduk, tentunya lebih baik jika melibatkan umat Katolik dalam perumusan peraturan perundang-undangan (wawancara Anton Belle, 11/5/2015).

Kebhinnekaan

Petikan wawancara dengan orang muda Katolitk "Bagi saya kebhinnekaan itu seperti mimpi indah, saat terbangun kenyataan yang harus diterima sangat

berbeda. Kalua kita mau merawatnya, maka kita tidur dulu, mimpilah indah tentang perbedaan" (wawancara dengan Mikhael Carolus Lebuan,17/5/2015). Mikhael Carolus Lebuan adalah gambaran orang muda Katolik di Kupang yang menyampaikan sikap skeptis terhadap realitas perbedaan pada kesatuan bangsa Indonesia. Fenomena anak muda Katolik yang skeptis terhadap agama, apalagi dihidupkan dalam suatu pemerintahan adalah sesuatu yang semakin banyak jumlah dan sering ditemui (Romo Ismartono, KWI, pada seminar 25/9/2015). Kekecewaannya terhadap keadaan kesejahteraan rakyat Indonesia, adalah gambaran situasi batin yang marah, hidup bersama dengan nasib berbeda. Lebuan menganggap, agama tidak lebih dari sebuah label untuk memberikan perlakuan berbeda, sejatinya kebhinnekaan adalah mozaik atas berbagai partikel berkontribusi setara dan diperlakukan secara seimbang.

Kebhinnekaan merupakan sesuatu yang menarik, karena bagi tokoh muda kebhinnekaan adalah kekayaan yang belum tereksploitasi secara penuh.Ibarat batu akik yang disadari berharga namun butuh upaya untuk membuatnya berkilau indah dan bermakna.Kebinnekaanbagi umat Katolik seperti ajaran tentang cinta kasih. Penyatuan perbedaan di kalangan iman Kristen terwujud melalui kegiatan oikumene, melalui kegiatan tersebut tercipta suatu konsep perlakuan yang sama antara Katholik dan Kristen. Adapun hubungan dengan agama lain adalah dilakukan dengan dialog, istilah ini dimaksudkan untuk menyatukan perbedaan berbasis manusia (humanitas) (wawancara dengan Anton Belle, 11/5/2015). "Orang Indonesia itu beragam, mesti diikat. Bhinneka itu berarti juga beragama berbeda, tunggal terikat, ika itu satu.Secara pribadi, saat ini saya merasa kita sedang diuji, butuh refleksi untuk kembali ke hakikat.kalau tidak diikat bisa goyah" jelas Romo Gerardus Duka (wawancara tanggal 12/5/2015). Komentar kritis diberikan oleh Norbert Jegalus (16/5/2015), bahwa konsep kebinnekaan itu milik semua negara di dunia, dapat dikatakan sebagai sebuah konsepsi universal, negaraJerman dan Amerika memiliki kata-kata serupa dalam lambang negaranya. Misalnya *E Pluribus Unum*, dari banyak menjadi satu. Hanya saja, Bhinneka Tunggal Ika sendirikan dicetuskan oleh nenek moyang Indonesia sebelum Eropa dan Amerika terbentuk, hal ini yang menjadi suatu kekayaan budaya tersendiri. Hubungan antara Katolik, Protestan dengan Islam seringkali diganggu oleh isu kristenisasi dan islamisasi. Unsur penyiaran dari masing-masing agama ini seringkali menimbulkan salah paham, acapkali menimbulkan ketegangan. Untuk itu perlu suatu kedewasaan dalam berbangsa, isu tidak produktif tersebut perlu diurai menjadi suatu proses pengetahuan dan pendewaan bagi pemeluknya. Jika tidak, urusan tersebut dapat memicu ketegangan antarumat beragama (wawancara dengan Romo Okto, 13/5/2015).

Kedaulatan Wilayah

Tidak ada satu negarapun yang mau melepaskan wilayahnya, begitu juga Indonesia.NKRI harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi, meskipun berhadapan dengan kenyataan kesejahteraan antar daerah, kenyatannya disparitas yang tinggi antara Indoensia Barat dan Timur. Faktor keadilan sosial adalah faktor yang paling mungkin menyebabkan separatisme.Jika ketidakadilan dimana-mana, nanti orang akan mencari yang suci untuk membenarkan kebencian yang dirasakannya terhadap orang lain. Hal ini terjadi di Papua dan Ambon, terjadinya kecemburuan ekonomi kadangkala melibatkan agama. Begitu juga di Kupang, kedatangan orang Bugis yang beragama Islam, mereka berbisnis, memulai usaha

disini, bekerja keras, lama-lama sukses beli ruko, motor mobil. Berikutnya adalah munculnya kecemburuan orang asli Kupang dan suku asli NTT mencarialasan dan cara agar Bugis angkat kaki dari NTT. Keadaan ini tidak baik, tetapi seringkali terjadi, jadi aspek kesejahteraan dan ketertinggalan tidak sederhana, perlu perhatian (wawancara dengan Norbert Jegalus, 16/5/2015). Wacana tentang federalism akan menimbulkan masalah bagi Indonesia, kalau mengaca ke negaraJerman yang berhasil disebankan mereka satu suku, yaitu Bavaria, begitu juga dengan Amerika meskipun multietnis tetapi keberadaan negara tidak berbasis daerah. Indonesia daerah berbasis suku, membentuk negara federasi dengan penduduk homogeniakan menjadi masalah tersendiri.

Aspek penting lain dalam hal melihat kedaulatan secara makro adalah identitas nasional. Pekerjaan penting ke depan adalah menyiptakan identitas nasional, urusan ini seringkali diabaikan, jika masih banyak orang beridentitas primordial, maka itu sangat memalukan. Identitas nasional dan kedaulatan wilayah adalah wujud komitmen pada persatuan untuk menghadapi persoalan hidup yang sama (wawancara dengan Khayus Makin. 15/5/2016).Politik itu adalah proses mensejahteraan manusia, membuat manusia tersenyum. tapi saat ini interes. Kepentingan umum yang harus didahulukan.NKRI harus dipertahankan, bukan soal uang saja, tetapi orang merasa *at home* atau tidak, orang merasa dihormati atau tidak. Jadi dalam ketenangan itu penting untuk berpikir dan bekerja (wawancara dengan Romo Okto, 13/5/2015).

Simpulan

Pancasila sebagai ideologi tidak bisa ditawar lagi, tidak hanya sebagai filosofi politik pembentuk bangsa namun merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologis masih sangat relevan dan harus dipertahankan, dengan beberapa catatan tentang eksistensi agama lokal, perkembangan arus modernisasi yang dapat menggeser ideology dan agama sehingga manusia hanya memerlukan hukum yang melindungi hak-hak mereka.

Adapun entitas agama dan pemeluknya merupakan aspek penting dalam hal membangun moralitas dan keseimbangan sistim sosial dan politik. Agama dipandang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia. Menyangkut hal kebhinnekaan, dalam ajaran Katolik yang diyakini oleh pemeluknya adalah suatu yang asasi dan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.Secara meyakinkan keberadaan umat Katolik dalam negara Indonesia cukup berpengaruh terutama dalam hal membangun menta serta membina kebersamaan dan persatuan Indonesia. Katolik melalui ajaran-ajaran yang dipahami baik menyangkut doktrin sampai dengan perilaku ibadah dan sikap sosialnya menunjukkan komitmen untuk bersama-sama umat lain menjaga keutuhan NKRI.

Sedangkan unsur kecintaan tanah air bagi umat Katolik terpusat pada jargon 100% Katolik, 100% Indonesia. Jargon tersebut sampai hari ini tetap dipopulerkan di kalangan gereja, tokoh awam, orang muda sampai dengan tingkat kelompok umat basis sejak dini ditanamkan kepada anak-anak.

Katolik tidak memerlukan formalisasi ajaran agama, ataupun mendirikan Negara-agamayang mengadopsi agama Katolik ataupun sebuah negara atau daerah khusus yang mengemban misi Katolik.Negara dengan sifat multikulturalisme lebih diperlukan untuk menjamin semua agama dan pemeluknya agar dapat melaksanakan ibadah dan ajaran agama dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalian data dan informasi di dalamnya. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

Aritonang, Jan Sihar and Streenbrink, Karel, A *History Of Christianity In Indonesia*, Leiden-Boston, 2008.

Adisusilo, Sutarjo. *Nasionalisme – Demokrasi – Civil Society.* Jurnal Historia Vitae: LPPM USD,Vol. 23 No. 2. Edisi Oktober 2009.

Adolf Heuken SJ. *Ensiklopedi Gereja.* Jilid V Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005.

Anderson, Benedict. *Imagined Communities,*(*Komunitas Komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist, 2006.

Baum, Gregory. *Nationalism, Religion and Ethics*, London: McGill University Press, 2001.

Cochran, Clarke J. *Religion in Public and Private Life*, Routledge-New York, 2014.

Gonggong, Anhar. *Mgr. Albertus Soegijapranata.* Jakarta: Grasindo, 2012.

Hägerdal, Hans. *Lords of the land, lords of the sea. Conflict and adaptation in early colonial Timor, 1600-1800*. KITLV Press: Leiden, 2012.

Hanifah, Abu. *Peranan Pemuda Sekitar Tahun 1928*. Museum Sumpah Pemuda, 1975.

Hardiman, Budi F. ***Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas***. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Irawan, B. Iwan. *Memahami Kebudayaan Amerika Latin Serta Peluang Kerjasama Indonesia Dengan Negara-Negara Amerika Latin.* Jurnal Online Westphalia, Vol.13,No.1, edisi Januari-Juni 2014.

Keuskupan Agung Kupang. *Memoir Uskup Keuskupan Agung Kupang*. Kupang: KAK, 1997.

Konferensi Wali Gereja Indonesia. *Iman Katolik.* Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Maarif, Syamsul. *"Definisi Agama dan Kebebasan Beragama"*Makalah Seminar Analisis Kebijakan, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama. Tidak diterbitkan.

Naisaban, Ladislaus., Neonbasu, Gregor., dam Tnano, Niko. *Gereja Katolik Pulau Timor dan Sekitarnya: Tahun 1556-2013*. Ende-Flodes: Lapopp Press, 2013.

Renan, Ernest, *(Qu'est ce qu'une nation?). Apakah bangsa itu?*.Penerjemah Mr. Sunario (1968), Pertjitakan Grezenberg, 1882.

Subanar, Budi. *Kilasan Kisah Soegijapranata.* Yogyakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Suharyo, Ignatius, Mgr. *the Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita.* Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Sunarso, DKK. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press, 2006.

Internet:

www.pewglobal.org

https://www.qureta.com